

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era reformasi atau dunia keterbukaan ini, segala hal termasuk kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat sangatlah dihormati dalam segala bidang. Publik disugahi banyak berita baik dari berbagai media baik massa cetak, media elektronik dan sosial media seperti *tweeter*, *whatsApp*, *facebook* dan lain sebagainya. Dari berbagai berita tersebut diantara sorotan tajam media pada era reformasi ini salah satunya adalah dalam bidang penegakan hukum, terutama penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Saking ramainya pemberitaan dimaksud hampir tiap hari di media massa dalam pemberitaannya menjadikan isu korupsi sebagai berita utama hangat yang selalu diungkap dan diekspos ke publik.

Profesi media massa adalah mengungkap kejadian-kejadian, sebagian dari kesibukan utamanya adalah mengkonstruksikan berbagai kejadian tersebut yang akan diberitakan. Media surat kabar atau media lainnya mengungkap berbagai realitas dari beberapa peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang aktual. Sehingga seluruh isi media merupakan realitas yang telah dikonstruksikan dalam bentuk yang bermakna.

Rating berita mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan dalam arti luas baik dari lembaga pelaksana pemerintah, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif semakin meningkat pasca terbentuknya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2003 sebagai wujud dari

disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbincangan mengenai bidang hukum di salah satu televisi pada acara ILC (*Indonesia Lawyers Club*) menjadi tayangan dan tontonan yang paling digemari oleh publik secara luas yang berkecimpung dalam profesi hukum baik dari kalangan mahasiswa, dosen, pengacara hingga masyarakat awam. Bahkan lembaga KPK hampir selalu dipenuhi puluhan pegiat dari berbagai media untuk meliput berita tentang tersangka korupsi. Kebijakan pimpinan KPK dalam memberitakan siapa yang akan menjadi tersangka seringkali ditunggu-tunggu oleh para wartawan, sehingga ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam penegakan hukum dalam institusi KPK.

Pemberitaan sebuah wacana berita tidak pernah lepas dari yang memberitakan itu sendiri. Seperti segala latar belakang budaya, pergaulan, dan pendidikan wartawan sangat memengaruhi bagaimana fakta dikonstruksi dalam sebuah berita. Dengan demikian, hampir tidak ada teks media atau berita yang sepenuhnya objektif atau hanya beberapa fakta yang dijadikan data untuk sebuah tulisan berita atau informasi. Selalu ada campur tangan pikiran sikap penulis serta editor atau bahkan kebijaksanaan redaksi surat kabar tersebut.

Sejalan dengan itu, Tebba menyatakan bahwa berita yang dilaporkan oleh media ada yang bersifat ideologis, politis dan bisnis. Ideologis suatu media massa biasanya ditentukan oleh latar belakang pendiri atau pemiliknya, baitu itu latar belakang agama maupun nilai-nilai yang dihayatinya.¹

¹ Aris Badara, *Analisis Wacanam Teori, Metode dan Penerapannya pada Wacana Media*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm., 11.

Pemberitaan di media massa akan memberikan pengaruh pada publik dengan tingkatan yang berbeda-beda, tergantung seberapa lama publik membaca dan menilai wacana berita tersebut. Dengan demikian, wartawan memberikan pengaruh dan menentukan terhadap berita yang disajikan. Penyajian berita di media massa dipengaruhi oleh banyak hal seperti agama, bisnis, ideologi, politik, dan lain sebagainya. Selain itu, seringkali peran media massa dipengaruhi kepentingan para petinggi negeri ini. Media massa mulai ditumpangi oleh para elit partai untuk memberikan dan saling menyebarkan pengaruh ataupun untuk membentuk citra diri yang baik di masyarakat. Para elit partai senantiasa memaksimalkan media massa untuk bisa menonjolkan lebih sempurna tampilan-tampilan yang berhubungan dengan kemanusiaan.

Berita tidak akan pernah terlepas dari fakta, maka dari itu pembuatan berita yang ditulis dengan apa adanya akan kering gaya dan tidak memberikan variasi ketika dibaca atau didengar. Penyajian berita berkaitan pula dengan gaya penulisan. Hal inilah yang menjadikan berita menjadi lebih berwarna. Dengan begitu, tidak ada teks media atau berita yang sepenuhnya objektif atau hanya kumpulan fakta yang dijadikan data untuk sebuah tulisan. Selalu ada campur tangan pikiran dan sikap penulis serta editor atau bahkan kebijakan redaksi media tersebut.

Dalam pandangan kritis media juga dipandang sebagai wujud dari pertarungan ideologi antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Di sini media bukan sarana yang netral yang menampilkan kekuatan dan kelompok

dalam masyarakat secara apa adanya, tetapi kelompok dan ideologi yang dominan itulah yang akan tampil dalam pemberitaan.²

Kebebasan dalam menumbuhkan dan mengembangkan ideologi adalah salah satu bentuk hak demokrasi media massa untuk menampilkan kebenaran dan hal yang nyata sesuai dengan yang diyakininya. Kebijakan resmi redaksi terhadap suatu persoalan bukan hanya tertuang dalam wacana berita, tetapi juga pada arah berita. Inilah yang menjadi ciri ideologi suatu media massa untuk menampilkan jati dirinya. Hal ini tidak hanya digunakan untuk mendominasi orang lain atau kelompok tertentu, tetapi juga sebagai sebuah ikhtiar berjuang melawan dominasi itu sendiri. Dengan demikian, wacana berita yang tercipta melalui bahasa tidak lagi semata-mata mencerminkan realitas dan pendapat seseorang, tetapi juga sebagai pusat menciptakan realitas. Inilah yang disebut tidak ada wacana yang tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi.

Media massa dewasa ini sebagian didominasi oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk suatu kepentingan terhadap kelompok yang tidak dominan. Dominasi yang terjadi di publik dilakukan dengan cara menghegemoni. Isi berita yang merepresentasikan ideologi media sehingga ada efek pengaruh yang diciptakan seakan-akan menjadi suatu wujud nyata dalam masyarakat. Orientasi dari penciptaan realitas tersebut dimaksudkan mempengaruhi, mengubah paradigma masyarakat, bahkan psikis seseorang agar sesuai dengan dimaksud pewarta atau penulis dalam wacana yang diciptakan. Hal itulah menjadi

² Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2015), hlm., 37.

indikator bahwa bahasa dalam media massa dipilih melalui proses perencanaan dan bahkan hasil kajian sebagai alat utama penyampai ideologi.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sumadiria bahwa media massa harus berpijak kepada filosofi media, visi media, misi media, dan kebijakan redaksional media. Semua yang disajikan media kepada pemirsa memiliki ideologi, kepentingan dari lembaga dari media tersebut. Muatan ideologi dan kepentingan tersebut ditransformasi dalam bentuk wacana berita. Dalam konteks itu, berita bukan hanya penyajian sejumlah fakta yang tersusun sehingga enak dibaca, melainkan juga mengandung dan menyajikan interpretasi akan arti dan makna dari peristiwa tersebut.³

Ekspresi yang dimunculkan oleh masyarakat ini dibangun dengan tujuan bahwa hukum akan dapat menjadi efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran dihukum. Hal ini sekaligus menempatkan suatu kewajiban moral atas masyarakat untuk menghukum kejahatan sebagaimana masyarakat menempatkan suatu kewajiban moral atas anggotanya untuk menahan diri agar tidak melanggar hukum. Penjatuhan hukuman menandakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat dan menegaskan kembali nilai-nilai hukum pidana yang dirancang untuk ditegaskan. Hal ini merefleksikan pandangan yang lebih modern tentang tempat yang lebih tepat bagi retribusi dalam sistem peradilan pidana peran media massa menjadi besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Opini publik akan terbawa dalam diskusi-diskusi maupun dialog-dialog para pengamat hukum yang tampil dilayar kaca. Sehingga masyarakat semakin

³ Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm., 21.

tercerdaskan baik dari sisi pemahaman dalam bidang hukum maupun efek jera yang akan dialami oleh para koruptor kalangan birokrat pemerintahan.

Selain itu, perkembangan kinerja KPK perlu diapresiasi. Dukungan masyarakat luas pada KPK sangat besar. Semakin beraneka ragam modus koruptor dalam mengeruk kekayaan negara serta adanya arus untuk melemahkan posisi KPK patut diwaspadai jangan sampai menurunkan etos kerja dalam memberantas tindak pidana korupsi. Institusi KPK telah mendapat nama baik dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam lembaganya, sehingga diharapkan akan bisa menjadi contoh bagi institusi negara lainnya, apalagi institusi penegak hukum KPK telah mendapat dukungan dari pers dan masyarakat.

KPK membutuhkan figur pemimpin yang mampu memberikan perlindungan hukum secara luas untuk insan-insan KPK. Selain itu, pemimpin KPK juga harus memiliki semangat untuk berjuang, bukan sekadar mencari pekerjaan dan pada akhirnya hanya menjalankan pekerjaan secara rutin. Jika calon pimpinan yang dipilih bermasalah dan tidak memiliki integritas, ia meragukan apakah pemimpin tersebut mampu memberikan perlindungan yang diperlukan untuk upaya pemberantasan korupsi. Alih-alih memberi perlindungan, pemimpin yang demikian justru akan memberangus KPK. Karena itu, seleksi calon pimpinan KPK dianggap menjadi hal yang krusial untuk mendapat perhatian bukan hanya dari orang-orang KPK sendiri, melainkan juga masyarakat, khususnya semua orang yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.

Media massa juga bisa disebut sebagai saluran komunikasi politik yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik dengan kekuatan

memengaruhi khalayak didukung oleh jangkauan yang luas, serentak dan cepat, sehingga media menjadikannya cara yang efektif membentuk opini publik oleh komunikator politik. Media memiliki peran memegang peranan sebagai mediator yang akan mempertemukan realitas dengan gambaran yang ada dalam pikiran. Media massa bukan hanya sebagai sarana untuk menyampaikan peristiwa politik saja, melainkan juga dapat sebagai kekuatan penyebaran ideologi yang mendominasinya. Jadi masyarakat dapat melihat representasi media massa dari ideologi tersebut. Dengan adanya kekuatan besar dalam pembentukan opini, media massa sering dijadikan sebagai kekuatan tujuan-tujuan politik, seperti lembaga-lembaga politik, LSM, dan sebagainya yang mempunyai kepentingan politik.

Kompas.com adalah portal berita dan artikel daring salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Portal ini dinilai banyak kalangan sebagai portal terdepan dalam hal berita-berita baru (*breaking news*). Kompas.com juga selalu aktif memberitakan isu-isu politik dalam membingkai dan mengemas sebuah berita dengan konsep yang berbeda. Kompas.com merupakan media online dengan kekhasannya dalam menyajikan suatu berita secara ringkas dan santai. Gaya kepenulisannya yang begitu ringan sehingga mudah untuk dipahami, dan media online ini merupakan salah satu media dengan jumlah pengakses terbesar di Indonesia.

Untuk membangun dan meyaqinkan sebuah realitas berita yang ada maka akan sangatlah perlu diadakan sebuah analisis dimana penulis lebih cenderung untuk menggunakan analisis framing versi Robert Entman. Analisis versi ini

ditekankan bagaimana memberikan sebuah ilustrasi pada suatu proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari wujud nyata oleh media. Dalam framing milik Robert N. Entman ini kemudian diklasifikasi menjadi empat elemen yaitu: *Define Problems* (pendefinisian masalah), yaitu bagaimana suatu peristiwa dilihat sebagai apa, *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah), memperkirakan masalah atau sumber dari masalah, *Make Moral Judgement* (membuat pilihan moral), nilai moral apa yang ingin disajikan dalam berita, *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian), yaitu penyelesaian apa yang ingin ditawarkan untuk mengatasi konflik tersebut.

Konsep framing yang disampaikan oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Menurut Entman framing digunakan untuk menonjolkan suatu aspek yang ingin ditonjolkan dengan menempatkan isu-isu tertentu yang penting untuk diketahui pembaca.⁴

Dengan menyeleksi isu, wartawan dapat membingkai peristiwa dengan memasukkan atau mengeluarkan isu tergantung sudut pandang yang ingin mereka gunakan. Dengan menonjolkan peristiwa tertentu, mereka dapat menekankan dan membuat sebuah peristiwa menjadi penting dan menarik untuk diketahui khalayak.

⁴ Eriyanto, *Analisis Framing-Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), 186 – 292.

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Wartawan memutuskan apa yang akan ia beritakan, apa yang diliput dan apa yang harus dibuang, apa yang ditonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti kuasa bahasa dalam berita pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Media Massa Kompas.Com Menurut Perspektif Robert Entman. Maka pada realitas yang disajikan oleh Kompas.com tentang berita pemilihan pimpinan KPK, apakah mempunyai kemungkinan besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak (masyarakat) dalam memahami berita tersebut.

Dari sini, penulis memilih penelitian ini berfokus pada analisis framing menurut perspektif Robert Entman terkait dengan berita Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Media Massa pada Kompas.com. Mengenai latar belakang yang telah paparkan di atas inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian, karena itu penulis mengambil Judul “Analisis Framing Menurut Perspektif Robert Entman Dalam Berita Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Media Massa Kompas.com.

B. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti berawal dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu untuk dipecahkan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Suharsimi Arikanto bahwa “Masalah merupakan bagian dari kebutuhan seseorang untuk

dipecahkan, sehingga orang tertarik untuk mengadakan penelitian, karena dengan hasil penelitian akan terjawab serta solusi dari masalah yang dihadapi”.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk analisis framing menurut perspektif Robert Entman dalam berita pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Media Massa Kompas.com?
2. Bagaimana pengaruh analisis framing menurut perspektif Robert Entman dalam berita pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Media Massa Kompas.com?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengidentifikasi pengaruh kuasa bahasa dalam berita Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam media massa pada Kompas. com. Sedangkan secara operasional penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan analisis framing menurut perspektif Robert Entman dalam berita pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Media Massa Kompas.com.
2. Mendeskripsikan pengaruh analisis framing menurut perspektif Robert Entman dalam berita pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Media Massa Kompas.com?

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.,. 27.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang sangat besar baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam ilmu pendidikan. Data dan informasi yang diperoleh akan menjadi kontribusi besar dalam mengembangkan pemikiran berkaitan dengan pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Di sisi lain, semoga penelitian ini dapat mempermudah dan membantu penelitian lain yang nantinya bisa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah penelitian khususnya bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi bagi khalayak mengenai bagaimana suatu media dalam mengemas suatu pemberitaan. Pengemasan dalam suatu berita dilakukan tidak hanya berdasarkan isu yang berkembang tetapi juga sesuai dengan kenyataan dan tidak menimbulkan polemik publik.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penjelasan yang terperinci, yaitu:

1. Analisis Framing

Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti

halnya analisis isi dan analisis semiotik. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita.⁶

2. Robert Entman

Robert M. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Konsep mengenai framing ditulis dalam sebuah artikel untuk *Journal of Political Communication*. Konsep framing, Entman sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain.⁷

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁸

4. Media Massa

Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari,

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_framing, diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Robert_N._Entman, diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

⁸ <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf>, diakses tanggal 17 Februari 2021.

istilah ini sering disingkat menjadi media.⁹

5. Kompas.com

Kompas.com merupakan sebuah portal web yang berisi berita dan artikel *daring* di Indonesia. Kompas.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Kompas.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Meskipun begitu, Kompas.com merupakan yang terdepan dalam hal berita-berita baru (*breaking news*). Sejak tahun 1995, Kompas.com menjadi bagian dari Kompas Gramedia.¹⁰

F. Kajian Terdahulu

Tujuan kajian penelitian terdahulu ini adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi. Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan judul di atas, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan Anugrah (2013) mengenai “*Analisis isi dalam pemberitaan kontroversial pimpinan baru KPK 2019 di Media Online Detik.com*”

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pemberitaan kontroversi pimpinan baru KPK Firlil Bahuri di media Detik.com. dengan menggunakan teknik analisis isi kuantitatif dengan rumus persentasi. pemberitaan terkait Canpim

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa, diakses tanggal 17 Pebruari 2021

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas.com#:~:text=Kompas.com%20adalah%20sebuah%20portal,dan%20artikel%20daring%20di%20Indonesia.&text=Sejak%20tahun%201995%2C%20Kompas.com%20menjadi%20bagian%20dari%20Kompas%20Gramedia>. diakses tanggal 3 Maret 2021.

KPK yang baru yang di beritakan oleh Detik.com dari bulan Juni 2019 sampai Desember 2019 terkumpul 27 berita. Meliputi Indikator Pro (P) dan Kontra (K).

Hasil Dari penelitian pada bulan Juni Terkumpul satu berita maka peneliti menemukan Pro (P) sebanyak 5 atau di persentasekan menjadi 71,42% dan K sebanyak 2 atau di persentasekan menjadi 28,57%. Yang artinya penulis menemukan dari analisis isi berita Detik.com lebih Pro terhadap Canpim Firli Bahuri. Hasil Dari penelitian pada bulan Agustus Terkumpul satu berita maka peneliti menemukan Pro (P) sebanyak 7 atau di persentasekan menjadi 0% dan K sebanyak 0 atau di persentasekan menjadi 0%. Yang artinya penulis menemukan dari analisis isi berita Detik.com lebih Pro terhadap Canpim Firli Bahuri.

Hasil Dari penelitian pada bulan September Terkumpul 15 berita maka peneliti menemukan Pro (P) sebanyak 89 atau di persentasekan menjadi 53,61% dan K sebanyak 77 atau di persentasekan menjadi 46,38%. Yang artinya penulis menemukan dari analisis isi berita Detik.com lebih Pro terhadap Canpim Firli Bahuri. Hasil Dari penelitian pada bulan November Terkumpul 4 berita maka peneliti menemukan Pro (P) sebanyak 17 atau di persentasekan menjadi 70,83 % dan K sebanyak 7 atau di persentasekan menjadi 29,16%. Yang artinya penulis menemukan dari analisis isi berita Detik.com lebih Pro terhadap Canpim Firli Bahuri.

Hasil Dari penelitian pada bulan Desember Terkumpul 6 berita maka peneliti menemukan Pro (P) sebanyak 27 atau di persentasekan menjadi 54% dan K sebanyak 23 atau di persentasekan menjadi 46%. Yang artinya penulis menemukan dari analisis isi berita Detik.com lebih Pro terhadap Canpim Firli

Bahuri. Maka jumlah dari Juni sampai Desember 2019 terkumpul sebanyak 27 berita terkait Canpim KPK yang baru. Pro (P) sebanyak 145 atau persentasenya 57,08%. Kontra (K) sebanyak 109 atau persentasenya 42,91%. Perbedaan Pro dan Kontra pemberitaan di Detik.com Pro dengan Canpim Firlu Bahuri lebih mendominasi.

Penelitian yang dilakukan Shandika Politik tentang "*Kekuasaan dalam pemberitaan media online analisis framing pemberitaan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Detik.Com*". Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto.

Dari penelitian analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ini dapat disimpulkan bahwa media detik.com banyak membingkai berita revisi UU KPK sebagai upaya bentuk melemahkan dari lembaga KPK itu sendiri. Hal itu dibuktikan dari struktur sintaksis setiap pemberitaan yang muncul media selalu mengatakan revisi UU KPK adalah bagian dari pelemahan KPK yang dijadikan sebagai *headline* berita.

Dari hasil analisis pemingkai dapat disimpulkan bahwa detik.com membangun citra yang buruk terhadap revisi UU KPK yang diusulkan DPR, media detik.com menganggap revisi UU KPK adalah suatu tindakan pelanggaran. Hal tersebut ditonjolkan dari setiap pemberitaan yang muncul dalam penekanan kutipan yang menyatakan revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah adalah sebagai upaya sistematis, serampangan dan banyak hal ganjil selama pembahasan revisi UU KPK oleh DPR. Dalam memilih fakta media detik.com sangat dipengaruhi ideologi yang dominan yang berpengaruh di redaksi

detik.com, ideologi sebagaimana yang dibahas di bab 4 yang berkembang di media detik.com menganut Sistem Komunikasi Pancasila yang berbasis ideologi Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Pemilik media juga selalu menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam setiap pemberitaannya.

Dari analisis pembedingkaian terlihat bahwa media detik.com menunjukkan netralitas dan objektivitas media. Media detik.com sendiri tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik atau tokoh politik, framing yang dilakukan oleh media detik.com masih menunjukkan usaha media untuk melakukan pendekatan pada objektivitas dalam pemberitaan.